

Laporan Hasil Pemantauan Konflik di Aceh

1 – 30 April 2006
Bank Dunia/DSF



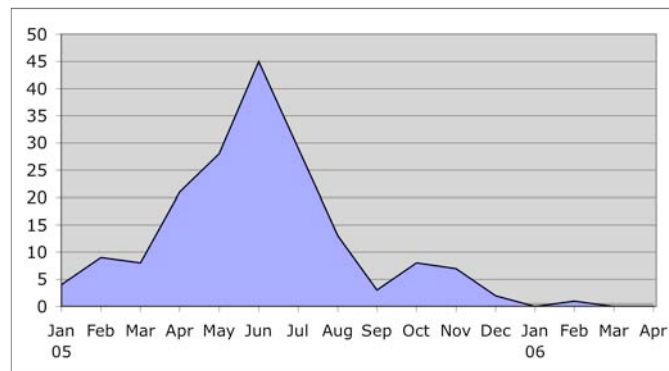
Sebagai bagian dari program dukungan untuk proses perdamaian, Program Konflik dan Pengembangan Masyarakat di Bank Dunia Jakarta menggunakan metodologi pemetaan konflik melalui surat kabar untuk merekam dan mengkategorikan semua laporan tentang insiden konflik di Aceh yang diberitakan di dua surat kabar daerah (Serambi dan Aceh Kita). Program ini mempublikasikan perkembangan per bulan, sejauh mungkin didukung oleh kunjungan ke lapangan, yang terangkum dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.¹

Tidak ada insiden GAM-RI yang terlapor di dua sumber surat kabar kami. Namun ada dua insiden yang berhubungan dengan pemerasan dan pungutan liar (pungli) oleh polisi dan mantan GAM di Aceh Timur, salah satunya diakhiri dengan kekerasan. Polisi di Aceh Utara mengumumkan temuan dari penyelidikan mereka atas insiden ‘penculikan’ di Aceh. GAM dinyatakan tidak terlibat dalam insiden ini. Keberhasilan penyelesaian kasus ini sebagian difasilitasi oleh inisiatif forum ‘Mini DiCoSA’ oleh kantor AMM setempat. Forum tingkat kecamatan ini melibatkan pemerintah setempat, GAM dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama membangun rasa kepercayaan, hubungan baik dan kerjasama. Forum lokal seperti ini bisa digunakan untuk pencegahan konflik sebelum dan sesudah Pilkada, untuk sosialisasi dan untuk penanganan keluhan. Konflik tingkat lokal masih tetap tinggi dengan 80 insiden yang terlapor di bulan ini, delapan di antaranya adalah kekerasan. Meskipun hanya ada dua insiden yang berhubungan dengan pemberian bantuan pasca-konflik, tinjauan lapangan yang dilakukan oleh tim Konflik dan Pengembangan Masyarakat di bulan April menunjukkan adanya kebingungan dan peningkatan rasa frustrasi yang disebabkan oleh pemberian bantuan reintegrasi untuk GAM yang kembali dan korban konflik. Laporan ini ditutup dengan temuan bahwa konflik politik tetap stabil dengan 12 insiden yang terlapor.

Tidak ada insiden konflik GAM-RI yang terlapor di April

Sekali lagi, tidak ada insiden GAM-RI yang terlapor di dua sumber surat kabar kami, Aceh Kita dan Serambi.

Gambar 1: Insiden GAM-RI berdasarkan bulan



Dua insiden pemerasan menimbulkan, salah satu menyebabkan kekerasan, di Aceh Timur

¹ Adanya keterbatasan dalam pemetaan melalui surat kabar terutama untuk insiden tingkat provinsi; surat kabar yang secara umum cuma memberitakan tentang berita tingkat daerah, tidak mengangkat semua kasus dan pemberitaan miring dalam melaporkan kasus-kasus tertentu. Untuk informasi lebih lanjut atau yang berminat dapat dilihat di: Patrick Barron and Joanne Sharpe (2005). "Counting Conflict: Using Newspaper Reports to Understand Violence in Indonesia", *Indonesia Social Development paper No. 7*, Jakarta: World Bank. Laporan ini merupakan perkembangan pemantauan per bulan, bisa di akses melalui: www.conflictanddevelopment.org data tersedia bagi siapa saja yang berminat, untuk mendapatkan semua dataset tersebut silahkan hubungi Samuel Clark di: sclark@wboj.or.id

Aceh Kita dan Serambi di Indra Makmur, Aceh Utara, melaporkan dua insiden terpisah atas konflik yang berhubungan dengan pemerasan.

- Pada tanggal 15 April, kelompok berisi sekitar 500 penduduk mendatangi Polsek dan memprotes penembakan tidak fatal atas seorang penduduk. Laporan menyatakan bahwa insiden dimulai ketika polisi setempat meminta Rp. 50.000 dari pengendara motor (penduduk desa) yang membawa getah. Penduduk tersebut tidak membawa cukup uang sehingga tidak mampu membayar. Hal ini membuat polisi marah. Polisi lalu mengancam dan kemudian menembak korban di kakinya. Malamnya, setelah berita tersebar luas di antara penduduk desa, kelompok itu mendatangi kantor polisi setempat. Ketika menemukan kantor tersebut kosong, mereka lalu mengebrak dan menyalakan api. Sekitar lima jam kemudian, Aceh Kita melaporkan bahwa ketika polisi memburu pelaku, mereka merusak pos kamling, sepeda motor dan memukuli 17 penduduk. Dua hari kemudian AMM mendatangi kantor polisi yang terbakar dengan Kapolda Aceh. Kapolda mengingatkan pasukannya bahwa mereka harus mengikuti prosedur dan kekerasan akan ditindaklanjuti.
- Insiden kedua sepertinya terpisah dari insiden pertama, meskipun terjadi di kecamatan yang sama. Serambi melaporkan pada tanggal 19 April bahwa polisi menangkap dua orang dan merusak pos pungli. Polisi menyatakan bahwa mereka yang ditangkap adalah mantan anggota GAM. Ketika ditangkap, pelaku meminta Rp.500.000 dari truk yang membawa lima ton getah pohon. Truk yang membawa muatan dari jalan Julok-Alue Ie Mirah dimintai antara Rp.50.000 hingga Rp.1.000.000 tergantung muatan yang dibawa.

Kedua insiden ini menunjukkan kesungguhan dan dampak negatif dari pemerasan yang berkelanjutan di Aceh. Keduanya menekankan pentingnya lembaga seperti polisi, TNI, GAM dan lembaga pemerintah yang lain seperti BRR untuk sungguh-sungguh menindak pemerasan terhadap penduduk desa dan pungli.

Keberhasilan penyelesaian insiden ‘penculikan’ di Cot Girek yang difasilitasi oleh inisiatif ‘Mini DcoSA’. Di bulan Februari yang lalu, Laporan ini mencatat kasus yang terlihat seperti penculikan di kecamatan Cot Girek, Aceh Utara. Insiden ini menimbulkan ketegangan antara GAM dan polisi, karena Polres menuduh mantan TNA sebagai pelaku penculikan. Namun penyelidikan polisi secara cermat menyimpulkan bahwa pegawai desa yang hilang ternyata lari ke Jawa untuk menghindari pembayaran hutang.

Keberhasilan penyelesaian kasus ini sebagian difasilitasi oleh keberadaan forum ‘Mini DcoSA’ di tingkat kecamatan. Forum ini diprakarsai oleh kantor AMM Aceh Utara dan dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan kecil dan kesalahpahaman di tingkat lokal dan membantu membangun rasa percaya, hubungan baik dan kerjasama antara pegawai pemerintah setempat, GAM dan tokoh masyarakat. Forum tersebut dipimpin oleh Camat dan melibatkan Kapolsek, Koramil, dua atau tiga perwakilan GAM, Mukim, satu atau dua Ulama. Sejak dibentuk pada akhir tahun lalu, 51 ‘Mini DiCoSA’ telah dilaksanakan di Aceh Utara. Di beberapa kecamatan hanya dilakukan satu atau dua kali dengan tujuan membangun rasa percaya dan bertukar nomor telepon; di kecamatan yang masih terdapat ketegangan, Mini DiCoSA dilaksanakan dengan lebih teratur untuk membahas insiden-insiden khusus.

Di Cot Girek, Mini DiCoSA telah diadakan tiga kali; pertama terfokus pada pembentukan hubungan baik dan dua pertemuan berikutnya membahas insiden penculikan. Berkenaan dengan penculikan, forum digunakan oleh para pihak untuk saling menanggapi insiden setelah kesalahan komunikasi sebelumnya dan membangun hubungan baik antara pihak-pihak yang berbeda. Sesaat setelah insiden dan sebelum diadakannya Mini DiCoSA, polisi menyatakan tuduhnya terhadap GAM sebagai pelaku penculikan kepada media. Dalam Mini DiCoSA, GAM menyangkal tuduhan tersebut dan pihak lain setuju agar polisi melakukan penyelidikan secara cermat. Pada tanggal 26

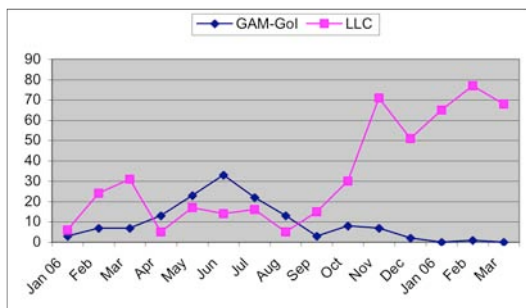
April 2006, Mini DiCoSA yang ketiga dilaksanakan di Cot Girek terutama untuk mengumumkan hasil penyelidikan dan membersihkan nama GAM dari tuduhan. Mini DiCoSA lalu membahas masalah lainnya termasuk komitmen untuk tidak memeras, keluhan GAM dan masyarakat atas monopolisasi usaha kelapa sawit, dan tuduhan penebangan liar.

Seperti yang ditekankan dalam insiden Cot Girek, forum tingkat lokal seperti ini memiliki peran penting dalam membangun hubungan baik, rasa percaya dan kerjasama di tingkat lokal. Forum tingkat lokal berpotensi untuk dilibatkan ke dalam pengelolaan konflik di masa Pilkada mendatang, partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, dan bantuan untuk menyelesaikan keluhan tentang kebijakan dan bantuan reintegrasi.

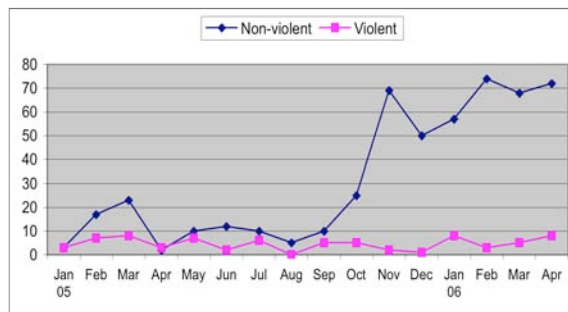
Konflik tingkat lokal tampaknya menjadi stabil di tingkat tinggi

Ada sedikit peningkatan dalam konflik tingkat lokal dengan jumlah 80 insiden di bulan April (lihat Gambar 2). Jumlah konflik tingkat lokal yang terlapor menjadi stabil di antara 70-80 insiden per bulan sejak tiga bulan terakhir. Konflik lokal di tingkat ini tetap tinggi dibandingkan jumlah konflik yang terlapor di tahun 2005. Jumlah insiden kekerasan masih rendah dengan delapan insiden yang terlapor (lihat Gambar 3).

Gambar 2: Konflik GAM-RI tingkat lokal berdasarkan bulan



Gambar 3: Konflik kekerasan dan bukan kekerasan tingkat lokal berdasarkan bulan



Kebingungan dalam bantuan reintegrasi bisa meningkatkan konflik tingkat lokal apabila tidak diperjelas.

Meskipun hanya terlapor dua insiden khusus yang berhubungan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat dan individu yang terkena dampak konflik, ada peningkatan terhadap kebingungan dan rasa frustrasi dalam bantuan reintegrasi dan pasca-konflik. Pada tanggal 19 April, beratus-ratus anggota kelompok anti-separatis Pembela Tanah Air mendatangi DPRD di Aceh Tengah dan Bener Meriah untuk meminta persamaan hak dalam mendapatkan bantuan, seperti mantan TNA dan korban konflik lainnya. Demikian pula pada tanggal 14 April, 23 mantan TNA yang menyerah sebelum MoU datang ke kantor Bupati untuk mendesak bantuan reintegrasi yang sekarang. Mereka menyatakan bahwa mereka adalah korban diskriminasi dan mereka tidak pernah menerima Rp.500.000 per bulan untuk enam bulan jadup (jatah hidup) yang dijanjikan.

Di bulan April ada juga sejumlah keluhan tentang pemberian bantuan reintegrasi. Meskipun bukan merupakan konflik besar, tetap saja hal tersebut menunjukkan masalah serius yang perlu diselesaikan. Contohnya, Aceh Kita melaporkan bahwa pengungsi konflik di Bener Meriah dan korban konflik di Aceh Utara masih menunggu janji (pemberian) rumah dan bantuan jadup. Kecemasan yang sama juga ditemukan saat tinjauan lapangan yang dilakukan oleh tim Konflik dan Pengembangan Masyarakat di bulan April. Kutipan berikut membuktikan kebingungan dan rasa frustrasi karena pengumuman BRA (Badan Reintegrasi Aceh) yang menyatakan bahwa BRA saat itu menerima proposal bagi mereka yang ingin mendapatkan bantuan mata pencaharian:

“Saya dapat semua proposal dari masyarakat tapi tidak tahu mau diapakan semuanya. Saya bilang begitu ke

semua orang tapi mereka cuma bilang 'coba kamu bisanya gimana lah'. Nggak bener kan kalau Camat malah tidak diberi penjelasan [dari BRA]. Saya mesti bilang apa?"

Camat, Cot Girek, Aceh Utara

Demikian pula, ketidakpuasan tampaknya makin tumbuh di antara mantan kombatan dan GAM kembali lainnya. Hampir 75 persen GAM yang kembali sekarang belum bekerja dan hampir tidak ada yang menerima cukup bantuan reintegrasi.² Selama ini mereka siap untuk menunggu, tetapi kemungkinan kesabaran mereka sebentar lagi berakhir.

"Kami udah kumpulkan banyak proposal ke BRA tapi semua ditolak. Tidak jelas kenapa ditolak. Kami punya pedomannya tapi tidak jelas. Kami punya setengah kamar penuh proposal, gabungan dari punya GAM dan masyarakat."

"Kalau memang benar ada bantuan, tolong jelaskan bantuannya!"

GAM, Aceh Utara

"Saya dengar BRA mau kasih bantuan tapi saya tidak tahu gimana dapatnya. Dua kali sudah kasih proposal ke KPA tapi ditolak. Saya tidak tahu harus bicara sama siapa di tingkat kabupaten."

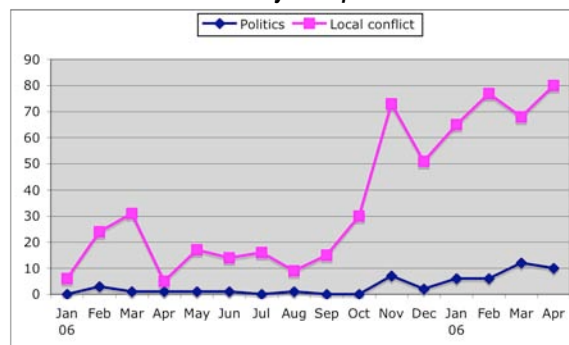
GAM tingkat desa, Pidie

Saat ini BRA menyusun ulang mekanisme dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak konflik dan sedang menyelesaikan anggaran 2006 untuk alokasi. Penting sekali bahwa informasi kelayakan dan proses mengakses dana adalah bersih dan transparan. Hal ini membutuhkan strategi komunikasi multi-medium yang efektif. Membangun dan mengiklankan sistem keluhan yang menyeluruh juga diperlukan. Penjelasan sistem seharusnya menjadi prioritas utama BRA di bulan Mei.

Konflik sumber daya dan politik tetap stabil

Jumlah konflik sumber daya dan politik tampaknya menjadi stabil setelah meningkat dengan lambat laun dalam tiga bulan terakhir (lihat Gambar 4). Terdapat sedikit peningkatan, namun jumlah insiden kekerasan mulai jatuh. Seperti bulan lalu, terjadi banyak demonstrasi – di Aceh dan Jakarta – untuk mendorong pemerintah nasional agar mengesahkan Rencana Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA). Sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan dan masih diperdebatkan oleh DPR.

Gambar 4: Konflik sumber daya dan politik berdasarkan bulan



² Lihat Bank Dunia (2006), *GAM Reintegration Needs Assessment: Enhancing Peace through Community-level Development Programming*, World Bank: Jakarta. Tersedia online di www.conflictanddevelopment.org.